

**TINJAUAN HAK TERSANGKA UNTUK MENOLAK
PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

RAHMAD ANWARI
NPM.18810644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

RAHMAD ANWARI. NPM.18810644. 2022.TINJAUAN HAK TERSANGKA UNTUK MENOLAK PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Hak Tersangka, Menolak Penandatanganan, BAP*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana dan untuk mengetahui perlindungan hak tersangka untuk menolak penandatanganan berita acara pemeriksaan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berita acara pemeriksaan tersangka merupakan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat) dan tersangka. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan oleh kepolisian yang dituangkan dalam BAP yang tidak ditandatangani oleh tersangka dan tersangka merasa dirugikan, maka tersangka berhak menggunakan upaya hukum Praperadilan dan ini bagian dari kedudukan hukum terhadap penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka yang diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP. Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Di antara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa hak diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara terhadap tersangka bahwa hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam pemeriksaan. Ketentuan perlindungan hak-hak tersangka di dalam KUHAP, khususnya terkait dengan penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas/tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amin, Rahman. 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Arief, N. Barda. 2011, *Reformasi Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Semarang: BP Undip
- Afiah, Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika pressindo
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni, 2007).
- Marzuki, Peter. Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta; Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta ; UII Pres
- Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

